

**KUNJUNGAN KAB/KOTA  
KE PPID  
PEMERINTAH BOJONEGORO  
TAHUN 2016**

## 1. Pemkot Madiun Kunjungi PPID Bojonegoro



Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, melakukan kunjungan di Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Bojonegoro, pada Senin (23/5). Kunjungan atau studi banding ini dilakukan untuk melengkapi sistem PPID di Pemkot Madiun. “Kami ingin melihat bagaimana PPID di Bojonegoro ini berjalan, karena PPID milik Pemkot Madiun masih banyak yang harus diperbaiki,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Madiun, Misdi, di sela kunjungannya.

Pihaknya mencari tahu bagaimana kinerja para karyawan di PPID, baik tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kontrak. Hal ini dinilai sangat berpengaruh pada hasil akhir yang didapatkan sehingga PPID Bojonegoro mendapat predikat PPID terinovasi se Jawa Timur. “Kami terinspirasi dengan PPID di Bojonegoro karena menjadi PPID terinovasi se Jawa Timur. Siapa tahu, kami bisa menyusul pada tahun berikutnya,” tandasnya. (dwi/mcb)

## 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Probolinggo Terinspirasi OGP dan PPID Di Bojonegoro



Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro menerima kunjungan dari Dinas Kominfo Probolinggo di aula kantor setempat, Kamis (28/07/2016). Rombongan Dinas Kominfo Probolinggo diterima Sekretaris Dinas Siti Nafilah yang mewakili Kadin Kominfo Kusnandaka Tjatur P dan Kabid Jaringan Komunikasi (Jarkom) Joko Suharmanto, Kabid Data, Desiminasi dan PTI Dinas Kominfo.

Menurut Hari Santoso, Kepala Bidang Informasi Dinkominfo Probolinggo, menjelaskan maksud kedatangannya bersama ke dua puluh orang rombongan untuk belajar terkait e-government dan PPID di Kabupaten Bojonegoro. "Selain itu sebagai momen sharing pengalaman dan pengetahuan masalah pemerintahan," katanya.

Dalam kesempatan itu Hari menjelaskan sejarah singkat terbentuknya Kominfo Probolinggo, yang lahir pada Desember 2012. "Dan memiliki tiga bidang, bidang informasi, bidang komunikasi dan bidang telematika," imbuhnya.

Sementara itu Kadin Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur P melalui Sekdin Siti Nafilah mengucapkan rasa terima kasihnya atas kedatangan Dinkominfo Probolinggo ke Bojonegoro. "Kunjungan ini diharapkan dapat saling memberikan masukan guna untuk meningkatkan sinegritas pemerintahan," ungkapnya.

Bu Fila sapaan akrab Sekdin Kominfo Bojonegoro menjelaskan perjalanan singkat perkembangan Kominfo Bojonegoro. "Di jaman modern seperti ini sudah selayaknya kita di tuntut untuk meleak IT. Mengingat Kominfo merupakan corong informasi daerah, sehingga harus lebih update di semua bidang," jelasnya.

Untuk menunjang kegiatan tersebut, dinkominfo Bojonegoro membentuk dewan IT untuk menunjang perkembangan IT di Kabupaten Bojonegoro. Setelah itu, Kominfo membangun sendiri jaringan tersebut dengan harapan lebih efisien. Pengembangan IT dimulai sejak tahun 2009, dimulai dari persiapan, pemanfaatan, pengembangan, penguatan dan next plan.

Dinkominfo Bojonegoro juga memiliki website resmi Pemkab dan Dinkominfo. Dalam website tersebut terdapat beberapa aplikasi di antaranya disperindag online, e-karier, statistik dan sebagainya.

“Dalam komponen website tersebut, kami selalu mengupdate berita setiap harinya untuk memantau perkembangan pemerintahan. Itu merupakan salah satu cara Kominfo menerapkan IT dalam keterbukaan informasi publik,” tandasnya.

Djoko Suharmanto Kabid Jarkom menambahkan tentang PPID dan pemanfaatan teknologi yang ada untuk keterbukaan publik. “Dalam pelaksanaannya kita memiliki beberapa langkah untuk terlebih dulu memahami permasalahan rakyat. Melalui sms bupati, radio Malowopati, dialog publik setiap jum’at dan aplikasi lapor,” paparnya.

Dari situ lanjut Joko, dapat mengetahui permasalahan rakyat sehingga dapat mencari solusi yang terbaik, karena aduan tersebut akan langsung di sampaikan ke SKPD terkait. “Adanya langkah tersebut maka secara perlahan Pemkab Bojonegoro dapat melakukan keterbukaan informasi publik, dan sejak tahun 2008 Pemkab sudah melakukan keterbukaan terkait anggaran,” pungkasnya.

Sementara itu dengan kunjungan ini di harapkan mampu untuk saling melengkapi dan memberi dorongan untuk mencetuskan terobosan baru yang lebih baik. (Rik/Kominfo)

### 3. Bupati Lampung Timur Belajar Keterbukaan Pemerintahan Bojonegoro



Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim dengan jajarannya melakukan studi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, untuk mempelajari keterbukaan Pemerintahan atau “Open Government Patnership” (OGP), Jumat (12/8).

“Kedatangan kami di Bojonegoro ini bermaksud untuk belajar soal keterbukaan Pemerintahan yang mampu melibatkan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan,” kata Chusnunia Chalim, yang biasa dipanggil Nuni itu.

Ia yang baru menjabat sebagai Bupati Lampung Timur sekitar 5 bulan itu, mengatakan kedatangannya itu juga karena daerah setempat merupakan kota ramah hak asasi manusia (HAM).

Oleh karena itu, menurut dia, keterbukaan pemerintahan atau “OGP” di daerah setempat akan dipelajari dan akan diterapkan di daerahnya.

“Kami akan mempelajari keterbukaan pemerintahan disini dan akan mengimplentasikan ke Lampung Timur,” katanya menegaskan.

Ia mengaku terkesan ketika mengikuti manajemen “review” dalam evaluasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), juga dialog publik Jumat.

Di dalam dialog publik itu, lanjut dia, bisa dimanfaatkan sebagai ajang untuk menyampaikan saran, masukan hingga kritik dari masyarakat kepada pemerintah.

Pada kesempatan itu, Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan bahwa praktik Pemerintahan yang terbuka atau “Open Government Patnership” (OGP) juga merupakan bagian dari ramah HAM.

Penerapannya, lanjut dia, memberikan hak kepada masyarakat untuk berpendapat melalui dialog Jumat.

“Bojonegoro juga akan juga akan mengadakan festival HAM pada November dengan mengangkat tema Merayakan Praktik Pancasila Di Tingkat Lokal”.

Dari data yang ada Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia.

Ibu kota kabupaten ini terletak di Sukadana. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.300 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebesar 989.639 jiwa (sensus 2010). Kabupaten ini memiliki semboyan “Bumei Tuwah Bepadan”. (\* /Humas)

#### 4. Pemerintah Kabupaten Lumajang Belajar Pelayanan Publik Di Bojonegoro



Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan kunjungan kerja ke Bojonegoro untuk menimba ilmu tentang pelayanan publik dan pelaksanaan SAKIP. Rombongan dari Kabupaten Lumajang itu diterima Asisten I Djoko Lukito, di gedung baru Pemkab lantai 2, Kamis (13/10).

Rombongan Pemkab Lumajang sejumlah 37 orang, yang terdiri dari Inspektorat, RSUD Dokter Hariyoto, Dispduk capil, Dinkes, Dinas pemberdayaan masyarakat, Disbudpar, Lingkungan Hidup, kantor pelayanan terpadu, Satpol PP, forum Lumajang sehat, Bagian organisasi, camat, Bagian humas, Disdik, DPU, BKD, Bappeda, Nakertransmigrasi, Pertanian, Akademisi dan Media.

Dalam kesempatan itu Asisten I Bagian Pemerintahan Djoko Lukito, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan Pemkab Lumajang. Dia kemudian menjelaskan singkat tentang sejarah Bojonegoro dan sampai akhirnya terpilih sebagai pilot project keterbukaan Pemerintahan (OGP).

Djoko Lukito juga menjelaskan, dalam melakukan pelayanan publik Pemkab Bojonegoro menggunakan sistem keterbukaan pemerintahan, sehingga masyarakat bisa dengan mudah untuk mengetahui bahkan meminta data kepada Pemerintah.

“Selain itu, Pemkab saat ini sudah menerapkan open dokumen kontrak, yang merupakan terobosan baru untuk menyempurnakan keterbukaan Pemerintahan,” ungkapnya.

Disamping itu, lanjut dia untuk pelayanan publik Pemkab Bojonegoro telah melakukan banyak hal, mulai dari kemudahan perijinan, kemudahan kepengurusan Akta. “Dan bahkan, ada banyak aplikasi aduan yang di sediakan Pemkab Bojonegoro untuk masyarakat,” ujarnya.

Masih kata mantan Camat Tambakrejo ini, Bojonegoro merupakan daerah rawan banjir, meski air Bengawan tidak penuh tapi karena kita berada di bagian hilir jadi kita terkena dampaknya. “Sehingga, siap ataupun tidak, kita harus berani dan mau menggauli banjir. Karena jika kita ramah dengan banjir, maka banjir akan bersahabat dengan kita,” jelasnya.

Sementara itu Perwakilan Pemkab Lumajang, Asisten Administrasi Slamet Supriyono mengatakan bahwa nilai plus yang ada di Bojonegoro yang menjadi daya pikat Kabupaten Lumajang melakukan kunker. “Kabupaten Lumajang masih mendapat nilai C dalam SAKIP, oleh karena itu kami beserta rombongan ingin menimba banyak ilmu di Kabupaten Bojonegoro,” katanya.

Untuk segi pelayanan publik, Bojonegoro merupakan roh yang mengajarkan demokrasi di Indonesia. Sehingga, suatu kebanggaan bagi Pemkab Lumajang, sedianya para pemangku kebijakan Pemkab Bojonegoro untuk membagi ilmunya. Dikatakan pula Kabupaten Lumajang memiliki jumlah penduduk yang tidak jauh beda dengan Bojonegoro. Untuk kesejahteraan rakyat, pariwisata bisa menjadi salah satu icon Lumajang.

“Selain itu, Lumajang dilalui sungai yang cukup panjang namun pengelolaan belum bisa maksimal,” paparnya.

Selain itu Lumajang merupakan daerah wisata, sehingga bisa jadi daya pikat Kabupaten. Lumajang memiliki 52 wisata alam, diantaranya B29, Semeru. Meski wisata milik pusat, Namun masyarakat sekitar masih terkena imbas yang baik untuk menunjang sektor perekonomian.

“Sehingga kita bisa berbagi pengalaman, dalam sektor pengelolaan wisata. Dengan harapan bisa saling bertukar ilmu dalam membangun pemerintahan masing-masing,” pungkasnya. (Rik/Kominfo)

## 5. Dishubkominfo Ponorogo Belajar Tata Kelola Pemerintahan Terbuka di Bojonegoro



Pasca pelaksanaan festival Open Government Partnership (OGP) membuat Kabupaten Bojonegoro menjadi trending topik. Banyak Daerah tetangga tertarik untuk belajar pemerintahan di Bojonegoro. Seperti yang dilakukan oleh Dishubkominfo Ponorogo yang mengunjungi Dinas Kominfo, Jumat (21/10).

Menurut Yuli Astuti Kepala Bidang Kominfo Ponorogo, kedatangannya ke Dinkominfo Bojonegoro sudah di rencanakan sejak lama. Dengan tujuan untuk belajar pengalaman Pemerintahan Terbuka, SOTK serta pengelolaan dan tata kerja Kedinasan di Kominfo Bojonegoro. "Sebab, sesuai SOTK baru bahwa Dishubkominfo Kabupaten Ponorogo akan dipisah. Sehingga, pilihan kami kepada Dinkominfo Bojonegoro, mengingat pengalaman berdiri sebagai dinas sudah jauh lebih lama," katanya.

Kusnandaka Tjatur P Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro mengucapkan rasa terima kasih dan rasa bangga atas apresiasi yang di berikan Dikatakan, untuk SOTK saat ini Dinkominfo Bojonegoro memiliki empat bidang, yakni bidang PTI, Bidang data dan informasi, bidang jaringan komunikasi (Jarkom) dan bidang diseminasi.

Dari pengelompokan tersebut, tentu setiap pegawainya akan bekerja sesuai dengan tupoksi bidangnya. "Intinya, dalam bekerja kami terus mengedepankan kolaborasi/kerjasama. Kerjasama ini dilakukan agar jaringan bisa luas, pengalaman juga bertambah," jelasnya.

Selain itu, dalam menjalankan pekerjaan Pemkab Bojonegoro menerapkan sistem open data kontrak (keterbukaan). Sehingga, masyarakat akan mudah untuk mendapat informasi data ataupun gambar cetakan, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Bojonegoro memiliki banyak jenis aplikasi aduan, seperti Laporan, PPID, sms Malowopati dan dialog jumat. "Setiap masyarakat berhak menyampaikan uneg-uneg terhadap pemerintah dan bisa mengajukan sanggahan," ujar Kusnandaka.

Di samping itu, Dinkominfo Bojonegoro juga membawahi media penyiaran radio Malowopati. Yang akan menginformasikan perkembangan Pemerintahan. Juga banyak aplikasi berbasis IT yang bisa diakses dengan mudah dan cepat. Harapannya dengan adanya pertemuan ini, sekiranya nanti bisa saling melengkapi dalam tata kelola Pemerintah. (Rik/Kominfo)

## 6. Pemerintah Kabupaten Kendal Kagumi Keterbukaan Pemerintah Bojonegoro



Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur P, menerima kunjungan dari Pemkab Kendal, Rabu pagi (2/11). Kunjungan ini dalam rangka study tiru dalam hal pengelolaan Pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, rombongan yang berjumlah empat orang disambut langsung oleh Kepala Dinas, diaula Kominfo. Dan sekilas di jelaskan mengenai Sotk, program dan hal-hal yang berkaitan dengan Kominfo. Setelah itu, rombongan di ajak ke media center untuk melihat secara langsung pelayanan PPID yang ada di Bojonegoro.

Kemudian, mereka juga mengunjungi radio Malowopati dan melihat mekanisme serta program unggulan radio tersebut. "Oww, ini radio yang ada program ayo mas bro nya?" tanya salah satu rombongan. "Iya, dan untuk jadwal siarannya sudah kami agendakan. Setiap jum'at khusus di bidang kesehatan," jawab Alit Saksama, Kepala Bidang Diseminasi Informasi Kominfo.

Lalu rombongan bergegas mengunjungi pameran OGP di gedung baru Pemkab, mereka terkagum melihat keterbukaan yang dilakukan Bojonegoro. "Apa mungkin Kabupaten Kendal mau melakukan transparansi seperti ini. Jelas mereka takut," ujar salah satu tamu, dengan tersenyum

Semua bisa dilakukan, dengan syarat adanya sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan (Pemerintah) dan komunitas. sebab, tanpa sinergi yang kuat dan dukungan yang cukup, transparansi ini tidak akan berjalan. (Rik/Kominfo)

## 7. Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Batang Studi Banding Tentang KIP di Bojonegoro



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro untuk kesekian kalinya pada tahun 2016 ini menerima kunjungan kerja dari Pemkab yang ada di Jawa Tengah. Kali ini, Kamis 1 Desember 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang melakukan studi banding ke Dinas Kominfo Bojonegoro dalam rangka meningkatkan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam hal manajemen open government dan menara telekomunikasi, yang dihadiri oleh Kabid Kominfo, Kasi Postel, dan beberapa staf teknis. Sedangkan dari Pemkab Bojonegoro dihadiri dari juga dari BAPPEDA, Dispenda dan Badan Perijinan.

Kabid Kominfo Dishub Kominfo Batang, Budianto pada pembuka studi banding menyampaikan tujuan kedatangannya untuk belajar secara khusus tentang peranan Kominfo yang menjadi jantungnya kegiatan Pemkab khususnya di Bojonegoro, peran Dinas Kominfo dalam mewujudkan open government serta pengelolaan menara telekomunikasi yang menjadi isu besar saat ini. Budianto juga menyampaikan bahwa Pemkab-pemkab yang ada di Provinsi Jawa Tengah menyikapi secara berbeda-beda dalam pengelolaan menara telekomunikasi karena tidak memiliki koordinasi yang baik, begitu pula belum ada arahan pasti dari tingkat Pemprov Jateng. Budianto juga menyampaikan beberapa kontradiksi yang terjadi dalam pengelolaan retribusi menara telekomunikasi dimana tahun 2014 baru dapat menarik retribusi dan sempat terhenti karena keputusan MK sehingga harus melakukan perubahan Perda yang dibahas bersama asosiasi menara telekomunikasi terkait pengelolaan menara telekomunikasi, sehingga pada tahun 2016 dapat kembali menarik retribusi.

Kabid Jaringan Komunikasi Dinas Kominfo Bojonegoro, Djoko Suharmanto sebagaimana diminta oleh Kadin Kominfo menjelaskan tentang penerapan open government (pemerintahan terbuka). Djoko Suharmanto menjelaskan sejarah ditunjuknya Bojonegoro mewakili Indonesia sebagai pilot project OGP internasional serta meluruskan tentang istilah yang terlanjur tidak tepat tentang OGP dimana orang mengartikan OGP adalah pemerintah terbuka. Djoko Suharmanto menjelaskan bahwa OGP (Open Government Partnership) adalah organisasi tingkat dunia yang beranggotakan 68 negara,

dimana Indonesia menjadi salah satu anggota, yang mana di Indonesia organisasi tersebut yaitu OGI (Open Government Indonesia). Pada tahun 2015, OGI menilai beberapa pemerintah Kabupaten namun tidak secara langsung. Mereka menilai melalui beberapa elemen masyarakat, dari akademisi, NGO, dan masyarakat secara langsung. Sesuai yang disampaikan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, salah satu rekomendasi pilot project open government di tingkat internasional adalah rekomendasi dari KI Provinsi Jatim sehingga OGI bersama NGO lain melakukan penelitian ke KI Provinsi Jatim yang pada akhirnya diundang ke BAPPENAS untuk menyampaikan paparan tentang pelaksanaan open government Kabupaten/Kota di Jatim yang pada akhirnya Bojonegoro terpilih mewakili Jatim. Selanjutnya di tingkat Nasional Bojonegoro dinilai bersama DKI Jakarta, DI Aceh, dan Kota Bandung dan dari beberapa kriteria, OGI menetapkan Kabupaten Bojonegoro untuk mewakili Indonesia sebagai pilot project OGP Internasional.

Djoko melanjutkan penjelasannya bahwa bersama DKI Jakarta, DI Aceh, dan Kota Bandung, Kabupaten Bojonegoro membangun komitmen-komitmen melalui rencana aksi 2016-2017. Khusus Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan komitmen sebagai open government adalah adanya kolaborasi yang merupakan ruh open government, kolaborasi dengan 4 sekawan yaitu Pemerintah, Pengusaha, Akademisi, dan Citizen (NGO). Djoko menambahkan bahwa awal-awal penguatan open government adalah melalui penguatan PPID baik dari sisi regulasi, penyediaan Desk PPID, serta melalui website PPID. Bahwa kolaborasi dengan RTIK dan Blogger sangat membantu pelaksanaan keterbukaan informasi. Selain itu untuk penguatan tingkat SKPD juga telah dilaksanakan Diklat PPID melalui BKD. Djoko Suharmanto kembali menambahkan tentang komitmen Pimpinan (Bupati Bojonegoro) yang sangat tinggi dalam penerapan open government, salah satunya melalui penerapan aplikasi LAPOR! yang setiap jum'at pagi ikut dievaluasi oleh Bupati Bojonegoro dalam kegiatan manajemen review di rumah dinas.

Selanjutnya Kabid Pengembangan TI, Nuriski Imandari menjelaskan tentang pengelolaan menara telekomunikasi, bahwa di Kabupaten Bojonegoro belum pernah dilakukan pemungutan retribusi dan belum ada satu SKPD pun yang ditunjuk untuk menangani pengelolaan menara telekomunikasi. Namun selama ini yang telah dilakukan sebatas pemberian ijin (Badan Perijinan dan Tim dari SKPD lain) serta pembayaran pajak, dan untuk penentuan tata ruang Cell Plan ditangani oleh BAPPEDA. Nuriski juga menambahkan bahwa terkait pemungutan retribusi menara telekomunikasi juga menjadi temuan BPK untuk tahun 2013 dan 2014 karena di salah satu Perda Kabupaten Bojonegoro telah mengatur pemungutan retribusi namun belum dilakukan. Dengan adanya putusan MA tentang nilai retribusi maka Perda telah disesuaikan dan telah disosialisasikan kepada asosiasi menara telekomunikasi. Namun dengan adanya perubahan OPD maka semua kegiatan tersebut sementara dihentikan sambil menunggu peraturan terkait SKPD yang harus menangani pengelolaan menara telekomunikasi. (Nuty/Dinkominfo)

## 8. Pemkab Temanggung Belajar Pengelolaan PPID di Bojonegoro



PPID Kabupaten Bojonegoro kembali dikunjungi salah satu Pemkab dari Provinsi Jawa Tengah yang ingin menimba pengetahuan tentang pengelolaan PPID. Kesempatan kali ini, Senin 5 Desember 2016 Tim Pengelola PPID dari Kabupaten Temanggung yang terdiri dari pejabat-pejabat pada BAPPEDA dan Dishub Kominfo Kabupaten Temanggung melakukan kunjungan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Bojonegoro.

Pimpinan rombongan dari BAPPEDA Kabupaten Temanggung menyampaikan bahwa latar belakang dipilihnya Kabupaten Bojonegoro untuk tujuan tersebut adalah atas rekomendasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, yang mana saat Komisi Informasi Provinsi Jateng melakukan evaluasi di Kabupaten Temanggung, mereka merekomendasikan dua Kabupaten untuk belajar pengelolaan PPID yaitu Palangkaraya dan Kabupaten Bojonegoro.

Sekretaris Dinas Kominfo, Siti Nafilah menyampaikan secara garis besar tentang struktur informasi Dinas Kominfo yang terdiri dari Sekretariat dan 3 (Tiga) Bidang, yang mana khusus 1 Bidang menangani IT dan 2 Non IT. Siti Nafilah menyampaikan bahwa penanganan PPID menjadi tupoksi Bidang Jaringan Komunikasi, dan terkait kelembagaan PPID Utama dan PPID Pembantu, SOP PPID, jenis-jenis informasi yang disampaikan pada website PPID Utama dan PPID Pembantu, penanganan sengketa informasi, evaluasi pelaksanaan PPID Utama dan PPID Pembantu, serta Perda / Perbup yang mendukung PPID akan dijelaskan oleh Kabid Jaringan Komunikasi.

Selanjutnya Kabid Jaringan Komunikasi Dinas Kominfo Bojonegoro, Djoko Suharmanto menyampaikan bahwa keterbukaan informasi adalah hal dasar baru yang merupakan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi khususnya tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Joko Suharmanto menyampaikan sejarah singkat awal terbitnya UU Keterbukaan Informasi Publik yang salah satunya adalah faktor pertanggungjawaban penggunaan APBD dan APBN yang bersumber dari uang rakyat yaitu pajak. Bahwa diterbitkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 dilatarbelakangi saat Presiden SBY menjadi ketua inisiator keterbukaan informasi pemerintahan dari negara-negara internasional.

Joko Suharmanto berikutnya menjelaskan tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bojonegoro yang mana telah dimulai sejak tahun 2008 melalui kegiatan Dialog Publik di Pendopo Pemkab setiap hari Jumat jam 13.30 WIB s/d selesai, dimana semua warga Bojonegoro bebas datang untuk menyampaikan keluhan dan aspirasinya melalui Dialog Publik yang langsung ditanggapi dan dilakukan proses penanganan oleh SKPD terkait.

Di sisi lain penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang PPID di Bojonegoro mengalami proses yang cukup rumit dan panjang hampir 9 bulan akhirnya ditetapkan oleh Bupati Bojonegoro. Perbup dimaksud merupakan break down dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, yang sebelumnya diawali dengan SK Bupati Tahun 2011 terkait PPID. Selanjutnya pada tahun 2012-2013 dikuatkan dengan Desk Layanan Informasi, serta pembuatan website PPID dan mengisi informasi publik pada website tersebut karena standar penilaian dari KIP yang pertama adalah website tentang PPID.

Terkait dengan informasi yang diunggah di website PPID Kabupaten Bojonegoro mengacu ketentuan yang ditetapkan oleh KIP Provinsi, termasuk standar alur permohonan informasi publik secara online maupun offline (datang langsung). Oleh karena itu akses-akses informasi dibuka, seperti SMS Center ke 1708 (melalui aplikasi LAPOR), surat keluhan masyarakat melalui media RADAR Bojonegoro, WA Bupati, SMS Bupati, Dialog Publik, dan SMS Radio Malowopati. Bahwa semua permohonan informasi melalui akses-akses informasi tersebut dimasukkan ke website PPID dan terkait tindak lanjutnya selalu disinergikan dengan PPID Pembantu pada SKPD terkait. (Nuty/Dinkominfo)